

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA ASSESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) SEBAGAI BENTUK PERUBAHAN UJIAN NASIONAL (UN)

Mizanul Hasanah

mizanulhasanah@gmail.com

Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Indonesia

Tri Fahad Lukman Hakim

trifahadlukmanhakim@gmail.com

Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Indonesia

Abstract:

The curriculum in Indonesia is a form of equal distribution of education in a country. So, the success of a country in the realm of education depends on the curriculum in that country. In Indonesia, the curriculum has been changing for a long time. The purpose of these changes in the evaluation of the previous curriculum. Since the inauguration of the material for education and culture, many curriculum changes have occurred at all levels, one of which is the National Assessment, namely AKM. Minimum ability assessment (AKM) is a policy of the Ministry of Education and Culture as a substitute for the National Examination (UN). Is this activity successful on target and able to boost the quality of education in Indonesia? It all depends on the implementation of the objectives of AKM activities. The author's purpose is to analyze the AKM activities which this year have been implemented at all levels of education in Indonesia with the theory of policy implementation. Researchers used a literature study approach. The results of the analysis show that the AKM government's policy as a substitute for the National Examination can be accepted by all parties, principals, students, and teachers. Implementation of the Minimum Competency Assessment (AKM) is not based on the ability to master the material according to the curriculum as in the national exam but is designed to map and improve the quality of education as a whole. Minimum Competency Assessment (AKM) focuses on mastering the literacy and numeracy competencies that will be measured.

Keywords: *Government policy, Minimum Competency Assessment, National exam*

Pendahuluan.

Pendidikan merupakan usaha dalam membina dan mengembangkan harkat dan martabat manusia secara utuh, menyeluruh dan menarik, menyenangkan dan menggembirakan. Pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah usai dan selesai, oleh karenanya pengendalian mutu sangat diperlukan. Hal ini agar di

masa depan sistem pendidikan lebih terarah, efektif, relevan dan berkembang sesuai dinamika kehidupan suatu bangsa (Rony, 2021; Zulaikhah et al., 2020).

Pendidikan merupakan suatu usaha menguasai ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan formal ataupun nonformal guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Raharjo, 2013). Untuk mencapai hasil yang baik maka perlu disusun tujuan pendidikan nasional sesuai rumusan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sujana et al., 2019).

Berdasarkan tujuan tersebut maka perlu disusun sebuah kurikulum yang nantinya akan menjadi sebuah rencana serta mengatur isi, tujuan, metode, serta bahan ajar yang akan dipakai. Setelah pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan maka akan dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi pembelajaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan selama proses pendidikan berlangsung (Khosy'i'in, 2021; Puspito et al., 2021).

Meski demikian tidak semua jenis evaluasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan tujuan pendidikan. Jika menggunakan alat ukur yang tepat maka keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan jelas. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada siswa dan lembaga baik formal maupun nonformal pada tiap jenjang dan jenis Pendidikan (Nuryanta, 2008).

Oleh karena itu dalam melaksanakan evaluasi sebaiknya berdasarkan prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, sehingga setiap evaluasi yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga adalah bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan pendidikan merdeka belajar merupakan program yang diinisiasi oleh menteri pendidikan kebudayaan dan riset yang bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang bahagia bagi guru maupun siswa. Yang mana UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (Rokhim et al., 2021).

Wacana pelaksanaan asesmen kompetensi ini membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Hal ini akan mempengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran yang konvensional (Driessen, 2021). Sedangkan gagasan memberlakukan konsep literasi dan numerasi yang di susun secara mandiri oleh guru merupakan model penilaian yang bersifat progresif (Winata et al., 2021).

Asesmen Nasional merupakan evaluasi pendidikan yang sangat baru di Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi minimum (AKM), survey karakter dan lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Sementara survey karakter digunakan untuk mengukur hasil belajar emosional dalam profil pelajar Pancasila agar pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika asesmen dan kompetensi minimum dilakukan peserta didik, survey lingkungan belajar dilakukan pada semua pelaku pendidikan meliputi kepala sekolah, guru, dan peserta didik.

Survey lingkungan belajar dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan sekolah yang sesungguhnya (Novita, 2021).

Asesmen nasional dilakukan bertujuan untuk mengubah paradigma evaluasi pendidikan di Indonesia sebagai upaya mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil bukan mengevaluasi capaian peserta didik yang sebelumnya digunakan dalam Ujian Nasional. Asesmen nasional akan dilakukan pada jenjang pertengahan sekolah yaitu kelas 5 untuk tingkat SD/MI, kelas 8 untuk tingkat SMP/MTs, dan kelas 11 untuk tingkat SMA/MA/SMK sehingga mendorong guru dan kepala sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pelaku pendidikan untuk memperbaiki pembelajaran di tahun berikutnya (KEMENDIKBUD, 2019). Oleh karenanya guru dan siswa harus dipastikan kesiapannya karena Asesmen nasional ini menggunakan instrumen penilaiannya adalah PISA (*Programme for international student*) dan TIMSS (*Trend in international Mathematics and Science Study*).

Masih banyak guru dan calon guru yang belum mengetahui konsep asesmen nasional terutama asesmen kompetensi minimum (AKM) yang digunakan untuk mengukur kognitif siswa. Dalam kegiatan asesmen nasional bukan hanya guru dan siswa yang berperan aktif dalam mensukseskan rancangan dari meteri pendidikan dan kebudayaan. Peran penting juga dikoordinir langsung oleh kepala sekolah. Mencari informasi dan kisi-kisi serta capaian yang tepat dalam AKM sehingga guru dan siswa mampu menghadapi asesmen nasional pada tahun ini.

Metode Penelitian.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana referensi yang didapatkan baik informasi dan data didapat dari bahan yang ada di perpustakaan. Contohnya buku referensi hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, berbagai jurnal, *repository*, dan berbagai jurnal yang masih berhubungan dengan rumusan masalah. Ciri khusus, antara lain: berhadapan langsung dengan teks atau data angka bukan dengan lapangan atau saksi mata, siap pakai, artinya peneliti tidak harus pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber data sekunder, dan terakhir adalah kondisi data diperpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu (Sugiono, 2015).

Penelitian ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengumpulan yang mana data harus menentukan sumber-sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Metode penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang mana literturnya mengutip dari berbagai sumber. Baik sumber yang berasal dari buku maupun jurnal yang terkait. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa perpustakaan merupakan tempat yang paling kaya akan sumber dan mudah untuk ditemukan (Yusanto, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Nasional

Empat pokok dalam bahasan merdeka belajar dalam pemaparan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si, yakni memaparkan empat pokok kebijakan dari program “Merdeka Belajar” . salah satunya adalah penghapusan ujian nasional (UN) dan penilaian digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei karakter, serta Survei lingkungan belajar) (Rokhim et al., 2021) AN dan UN memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan evaluasi capaian secara individu, tetapi secara keseluruhan, dan dilaksanakan secara berkala untuk memetakan sistem pendidikan. Secara umum asesmen tidak hanya menilai pengetahuan saja, tetapi mencakup semua metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan motivasi (Ansari & Saleh, 2019)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan program pemerintah untuk menilai kualitas (mutu) setiap lembaga pendidikan formal setara SD, SMP dan SMA. Kualitas dinilai dari hasil belajar peserta didik yang paling dasar. Untuk klasifikasi tersebut digunakan instrument yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Penilaian ini terdiri atas kemampuan menalar pada penerapan pengucapan (literasi), dengan ketercapaian menalar merealisasikan angka (numerasi), serta membantu pengetahuan kepribadian. Penilaian ini digunakan guna menimbang kesanggupan siswa dalam mencerna ilmu dan penguatan pendidikan karakter (Winata et al., 2021).

Konsep Assesmen Nasional

Asesmen merupakan proses mengumpulkan data tentang perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dapat dikatakan sebagai penilaian proses, perkembangan, serta hasil belajar siswa. Dengan demikian asesmen adalah istilah yang tepat untuk mengukur proses belajar siswa. Asesmen dibedakan menjadi dua kelompok yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional meliputi tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sedangkan asesmen alternatif meliputi soal uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, inventori, daftar Cek, penilaian teman sejawat, penilaian diri, portofolio, observasi, diskusi dan wawancara.

Pelaksanaan asesmen bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keberhasilan penguasaan kompetensi siswa, (2) mendeskripsikan keberhasilan proses pembelajaran, (3) menentukan tindak lanjut hasil penilaian, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah kepada orang tua dan masyarakat, serta (5) sebagai bahan perbaikan proses kegiatan belajar mengajar (Waizah & Herwani, 2021).

Assesmen Kompetensi Minimum

Komponen utama pendidikan dibedakan menjadi tiga yaitu kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Kurikulum mencakup tentang apa yang akan dipelajari. Pembelajaran menyangkut tentang bagaimana cara mencapai tujuan untuk menguasai materi sesuai dengan kurikulum. Sedangkan asesmen mengukur tentang segala sesuatu yang sudah dipelajari, apa saja dan sejauh mana. Assesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi

sebanyak-banyaknya tentang sejauh mana keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswanya. Asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa (Awandha, n.d.).

Hasil AKM dimaksudkan untuk memaparkan informasi tentang tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Hal inilah yang akan dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian siswa ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai konten suatu mata pelajaran. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik atau konten suatu materi tertentu melainkan mencakup konten, konteks dan proses kognitif yang harus dilalui oleh siswa. Pelaksanaan asesmen kompetensi ini membuat guru harus lebih kreatif dalam menyusun instrument penilaian untuk siswa (Rokhim et al., 2021). Secara tidak langsung, guru yang mengajar menggunakan model konvensional juga harus diganti menjadi model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Pelaksanaan asesmen kompetensi memiliki pendekatan Student Centered Learning (SCL) (Nehru 2019). SCL merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Hal ini karena pelaksanaan pembelajaran yang bersifat konservatif atau konvensional tidak dapat menjadi wadah pelaksanaan asesmen nasional. Dengan memperbanyak peran siswa dalam proses pembelajaran maka akan memudahkan dalam penguasaan literasi numerasi yang menjadi salah satu target (Kholili & Rokhman, 2021; Mualim & Swandari, 2021).

Literasi Numerasi

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah kontekstual pada kehidupan sehari - hari yang sesuai untuk individu sebagai warga yang baik (KEMENDIKBUD, 2019). Kemampuan numerasi dapat dijadikan modal bagi siswa dalam menguasai mata pelajaran lainnya. Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kecakapan untuk (1) memperoleh, menafsirkan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan; (2) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mengambil keputusan.

Kemampuan literasi numerasi berkaitan dengan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dimiliki, prinsip serta proses matematika ke dalam permasalahan dalam kehidupan sehari - hari misalnya memahami masalah yang disajikan dalam tabel atau diagram, perdagangan dan lain - lain. Literasi numerasi berbeda dengan kompetensi matematika, dimana perbedaan terletak pada pemanfaatan konsep dan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tentang

matematika tidak cukup membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Literasi numerasi diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang membutuhkan banyak cara penyelesaian, permasalahan tidak terstruktur, serta permasalahan yang tidak ada penyelesaian yang tuntas dan tidak berhubungan dengan factor non-mateatis (Solechan, 2021).

Sebagai contoh kemampuan literasi numerasi dapat dicermati pada soal berikut ini, sekelompok siswa akan melakukan kegiatan karyawisata menggunakan bus berkapasitas 44 orang. Jika peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 115 siswa, maka banyak bus yang digunakan untuk menghemat biaya? Pada soal jenis ini, siswa dilatih untuk bernalar bahwa walaupun 115:44 hasilnya adalah 2,61 tetapi dalam kegiatan tersebut tidak serta merta menggunakan 3 bus dengan kapasitas 44 orang melainkan menggunakan 2 bus berkapasitas 44 orang dan 1 bus berkapasitas kecil sehingga bisa menghemat biaya (Nurjanah, 2021). Kemampuan numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dimiliki tetapi pembelajaran matematika belum tentu bias menumbuhkan kemampuan tersebut jika tidak dipersiapkan sebelumnya.

Penyusunan Soal AKM

Penyusunan asesmen kompetensi berbasis pada penilaian daya nalar menggunakan bahasa (literasi) dan daya nalar berbasis data angka (numerasi) yang bertolak ukur dari konsep Programme for International Student Assessment (PISA) (Nehru 2019). Konsep penilaian ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik atau konten suatu materi tertentu melainkan mencakup beberapa komponen yaitu konten, konteks dan proses kognitif yang harus dilalui oleh siswa (Novita, 2021).

Analisis Kebijakan Pelaksanaan AKM

Kebijakan bahwa akan dilaksanakannya AKM pada tahun 2020 lalu menjadi pekerjaan rumah bagi kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan stake holder. Pasalnya Assesmen Nasional merupakan hal yang baru bagi semua pihak. Dibutuhkan penyuluhan, pelatihan, simulasi soal, konsep soal yang akan didistribusikan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut direkomendasikan oleh pembuat kebijakan. Namun, bukan jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan pelaksanaannya. Karenanya dibutuhkan kerjasama semua pihak. Keberhasilan suatu kebijakan bukan dilihat pada pembuat kebijakan, akan tetapi apakah ada pengaruh atau dampak yang diterima oleh penerima kebijakan tersebut. pada akhirnya assesmen nasional yang lebih dekat dengan sebutan AKM akan menjadi bahan percobaan sama seperti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2004 lalu di Indonesia.

Pada hakikatnya tujuan pelaksanaan UN dan AKM adalah sama yakni mengukur mutu pendidikan pada seluruh sekolah atau madrasah. Apakah nantinya pelaksanaan kegiatan AKM ini mampu mengurangi benang kusut yang menjadi penyebab keterpurukan pendidikan di Indonesia atau hanya akan menjadi proyek seperti kegiatan UN. Tentunya akan mengalami pembengkakan anggaran namun tak berdampak sama sekali pada mutu pendidikan Indonesia (Ilmi et al., 2021).

Pada setiap proses kebijakan yang diputuskan tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana implementasi mewujudkan kebijakan tersebut. proses implementasi pun menggambarkan pada kita bahwa kebijakan diawali dari tujuan kebijakan itu sendiri. Salah satunya adalah berupa anggaran. Input ini akan diolah dan dikonversi menjadi sebuah keluaran kebijakan (policy output), atau dalam bahasa sederhananya, luaran kebijakan merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yakni:

Komunikasi; keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada sasaran. Jika tujuannya dan sasaran kebijakan tidak jelas dan tidak tersampaikan, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sumberdaya; meskipun kebijakan telah dikomunikasikan, tetapi jika kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dimaksud adalah kompetensi implementor dan finansial (Ikramullah & Sirojuddin, 2020).

Disposisi; adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi baik, maka dia akan menjalankan kebijakan sesuai tujuan kebijakan, tetapi sebaliknya jika implementor memiliki perspektif berbeda dengan penyusun kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak efektif (Ismail et al., 2020). Struktur Birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya SOP (*standard operational procedures*) yang menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.

Kesimpulan

Untuk meningkatkan mutu SDM di Indonesia, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membuat kebijakan baru yang dinamakan kebijakan “Merdeka Belajar”. Kebijakan ini dibuat guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dikatakan rendah. Peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan agar warga negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan glo/balisasi dan juga dapat bersaing dengan beberapa negara maju. Jika peningkatan mutu pendidikan ini tidak dilakukan, maka negara Indonesia akan terus tertinggal dari negara lain. Mengingat hal ini tidak boleh terjadi, maka pemerintah Indonesia berusaha membuat beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kebijakan terbaru di Indonesia saat ini yaitu, kebijakan merdeka belajar.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bukan berdasar pada kemampuan menguasai materi sesuai kurikulum seperti dalam ujian nasional, tetapi dirancang untuk memetakan dan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) berfokus pada penguasaan kompetensi literasi dan numerasi yang akan diukur.

Kompleksitas implementasi kebijakan berakibat pada kegagalan sebuah kebijakan, artinya kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari faktor sumber daya manusia dan finansial, disamping itu penggunaan instrument yang disesuaikan dengan tingkat efisiensi penggunaannya. Implementasi kebijakan akan berhasil jika diawali dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi, menyampaikan tujuan kebijakan, melibatkan kelompok sasaran serta dukungan finansial yang tinggi. Disamping itu mekanisme dan strategi-strategi implementasi kebijakan menjadi sebuah jemabatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, AKM yang telah berlangsung pada oktober lalu sekaligus menjadi perdana bagi para stake holder, kepala sekolah guru dan semua pihak terkait menjadi evaluasi untuk kegiatan AKM kedepannya. Karena ini merupakan kebijakan dari pemangku kebijakan sehingga penerima kebijakan juga harus mampu menganalisis apa saja kekurangan pada pelaksanaan AKM tersebut. Tujuannya adalah untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia sebagaimana yang diharapkan bersama. Perlunya evaluasi sejak dini dalam menanggapi kebijakan yang telah diteloh diterapkan sehingga kedepan tidak ada cacat dalam mengawal kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ansari, B. I., & Saleh, M. (2019). Pengaruh Collaborative Teaching Dan Pengetahuan Awal Terhadap Kecemasan Matematis Siswa. *JIPMat*. <https://doi.org/10.26877/jipmat.v4i2.3959>
- Awandha, N. (n.d.). *Asesmen Kompetensi Sebagai Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak*.
- Driessen, G. (2021). Islamic Primary Schools in The Netherlands: The Founding, The Debate, and The Outcomes. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i1.1076>
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., & Hanafie, A. A. (2021). The Basic Concepts of Evaluation and Its Implementation in IRE Lessons in The Pandemic Era. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 175–190. <https://doi.org/10.31538/tijie.v2i2.50>
- Ismail, S., Zahrudin, M., Ruswandi, U., & Erihadiana, E. (2020). The Competence of Millennial Islamic Education Teachers in Facing The Challenges of Industrial Revolution. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 389–405. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.823>
- KEMENDIKBUD. (2019). *Asesmen Nasional (Asesmen kompetensi minimum, survey karakter, survey lapangan)*.
- Kholili, A., & Rokhman, M. (2021). Pengaruh Manajemen Pembelajaran Online Terhadap Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Review of Islamic Education*, 1(1), 25–34.

- Khosyi'in, A. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengambilan Keputusan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Kerja. *Chalim Journal of Teaching and Learning (CJoTL)*, 1(1), 45-55.
- Mualim, M., & Swandari, T. (2021). Kurikulum Program Imrithi dalam Mengembangkan Kompetensi Lulusan. *Review of Islamic Education*, 1(1), 1-9.
- Novita, N. (2021). *Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru*. 5(1).
- Nurjanah, E. (2021). *Kesiapan Calon Guru SD dalam Implementasi Asesmen Nasional*. 3(2).
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *El-Tarbawi*, 1(1), 55-69.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art5>
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning (CJoTL)*, 1(1), 85-98.
- Raharjo, S. B. (2013). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-532.
<https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>
- Rokhim, D. A., Rahayu, B. N., Alfiah, L. N., Peni, R., Wahyudi, B., Wahyudi, A., Widarti, H. R., & Malang, U. N. (2021). *Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, Dan Survey Lingkungan Belajar)*. 4, 61-71.
- Rony, R. (2021). Urgensi Manajemen Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik: The Urgency of School Organizational Culture Management Against Character Building Students. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(1), 98-121.
<https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.26>
- Solechan, S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Smp Islam Terpadu Al Ummah Jombang: Implementation of Management Information Systems at Al Ummah Integrated Islamic Junior High School Jombang. *Chalim Journal of Teaching and Learning (CJoTL)*, 1(1), 8-19.
- Sugiono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sujana, I. P. W. M., Darmawan, C., Budimansyah, D., & Sukadi. (2019). *Jurnal Inspirasi Pendidikan*. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*.
- Waizah, N., & Herwani, H. (2021). Penilaian Pengetahuan Tertulis Dalam Kurikulum 2013. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 207-228.
<https://doi.org/10.31538/tijie.v2i2.54>
- Winata, A., Seftia, I., Widiyanti, R., & Cacik, S. (2021). *Analisis Kemampuan Numerasi dalam Pengembangan Soal Asesmen Kemampuan Minimal pada Siswa Kelas XI SMA untuk Menyelesaikan Permasalahan Science*. 7(2), 498-508.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v7i2.1090>
- Yusanto, Y. (2019). *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. 1(1), 1-13.
- Zulaikhah, D., Sirojuddin, A., & Aprilianto, A. (2020). Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(1), 54-71.
<https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.6>